



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 122 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN KETENAGAKERJAAN

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan akuntabel sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, maka pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Agam tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

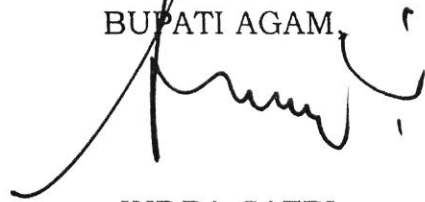
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan L+
6. embaran Negara Republik Inidonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admimnistrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 645);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Agam Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman bagi setiap pelaksana pekerjaan untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas, serta kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan penyelenggara, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- KETIGA : Penandatanganan Dokumen Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 9 Maret 2018

BUPATI AGAM,



INDRA CATRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 122 TAHUN 2018  
TANGGAL 9 MARET 2018

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN KETENAGAKERJAAN

NO	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Izin Pendirian Sekolah	Form 1 SP-PZ-01
2	Izin Operasional Sekolah	Form 2 SP-PZ-02
3	Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan	Form 3 SP-PZ-03
4	Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan	Form 4 SP-PZ-04
5	Izin pendirian Taman Bacaan Masyarakat	Form 5 SP-PZ-05
6	Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat	Form 6 SP-PZ-06
7	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Form 7 SP-PZ-07
8	Izin Operasional Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Form 8 SP-PZ-08
9	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	Form 9 SP-PZ-09
10	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	Form 10 SP-PZ-10
11	Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	Form 11 SP-PZ-11
12	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	Form 12 SP-PZ-12
13	Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman	Form 13 SP-PZ-13
14	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	Form 14 SP-PZ-14
15	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	Form 15 SP-PZ-15
16	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	Form 16 SP-PZ-16
17	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	Form 17 SP-PZ-17
18	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	Form 18 SP-PZ-18
19	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	Form 19 SP-PZ-19
20	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	Form 20 SP-PZ-20
21	Tanda Daftar Usaha SPA	Form 21 SP-PZ-21
22	Izin Warung Telekomunikasi (Wartel)	Form 22 SP-PZ-22
23	Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)	Form 23 SP-PZ-23

24	Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio atau Televisi	Form 24 SP-PZ-24
25	Izin Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi	Form 25 SP-PZ-25
26	Izin Usaha Penempatan Perangkat Telekomunikasi	Form 26 SP-PZ-26
27	Izin Galian Kabel Telekomunikasi dalam Satu Kabupaten	Form 27 SP-PZ-27
28	Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator	Form 28 SP-PZ-28
29	Izin Pemanfaatan Aset Daerah	Form 29 SP-PZ-28
30	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Form 30 SP-PZ-30
31	Izin Mendirikan Bangunan Gedung Bertingkat	Form 31 SP-PZ-31
32	Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pemerintah	Form 32 SP-PZ-32
33	Izin Mendirikan Bangunan Khusus	Form 33 SP-PZ-33
34	Izin Penyewaan Alat Berat	Form 34 SP-PZ-34
35	Izin Pemanfaatan Daerah Milik Jalan (DMJ)	Form 35 SP-PZ-35
36	Izin Pemanfaatan Ruang Skala Kecil	Form 36 SP-PZ-36
37	Izin Usaha Budidaya Pembenihan Ikan	Form 37 SP-PZ-37
38	Izin Usaha Perikanan Tambak	Form 38 SP-PZ-38
39	Izin Usaha Budidaya Ikan (SIPBI)	Form 39 SP-PZ-39
40	Izin Toko Obat Perikanan	Form 40 SP-PZ-40
41	Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Form 41 SP-PZ-41
42	Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Form 42 SP-PZ-42
43	Izin Penelitian	Form 43 SP-PZ-43
44	Rekomendasi Keramaian	Form 44 SP-PZ-44
45	Izin Lokasi	Form 45 SP-PZ-45
46	Rekomendasi IMB Perumahan & Pengembangan kawasan Permukiman	Form 46 SP-PZ-46
47	Rekomendasi Sarana Umum Perumahan	Form 47 SP-PZ-47
48	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	Form 48 SP-PZ-48
49	Kartu Pencari Kerja (AK.1)	Form 49 SP-PZ-49
50	Izin Lembaga Swasta	Form 50 SP-PZ-50
51	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Form 51 SP-PZ-51

52	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	Form 52 SP-PZ-52
53	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)	Form 53 SP-PZ-53
54	Izin Pengumpulan Sumbangan	Form 54 SP-PZ-54
55	Izin Pendirian Organisasi Sosial	Form 55 SP-PZ-55
56	Izin Operasional Panti Asuhan	Form 56 SP-PZ-56
57	Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP)	Form 57 SP-PZ-57
58	Izin Usaha Industri (IUI)	Form 58 SP-PZ-58
59	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Form 59 SP-PZ-59
60	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Form S60 SP-PZ-60
61	Izin Usaha Perluasan Industri	Form 61 SP-PZ-61
62	Izin Usaha Simpan Pinjam	Form 62 SP-PZ-62
63	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	Form 63 SP-PZ-63
64	Izin Usaha Toko Modern	Form 64 SP-PZ-64
65	Izin Tempat Usaha Perdagangan Kaki Lima	Form 65 SP-PZ-65
66	Izin Pameran dan Promosi Dagang	Form 66 SP-PZ-66
67	Surat Keterangan Penyimpan Barang (SKPB)	Form 67 SP-PZ-67
68	Rekomendasi Eksportif Terdaftar	Form 68 SP-PZ-68
69	Tanda Daftar Industri (TDI)	Form 69 SP-PZ-68
70	Izin Trayek Angkutan Perdesaan/ Angkutan Kota	Form 70 SP-PZ-70
71	Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Perdesaan / Angkot	Form 71 SP-PZ-71
72	Izin Insidentil Angkutan Perdesaan / Angkot	Form 72 SP-PZ-72
73	Izin Usaha Angkutan	Form 73 SP-PZ-73
74	Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan	Form 74 SP-PZ-74
75	Surat Tanda Pendaftaran Kapal	Form 75 SP-PZ-75
76	Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal	Form 76 SP-PZ-76
77	Izin Penyelenggaraan POS	Form 77 SP-PZ-77
78	Izin Prinsip Penanaman Modal	Form 78 SP-PZ-78
79	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Form 79 SP-PZ-79

80	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Form 80 SP-PZ-80
81	Izin Usaha (Perluasan, Perubahan, dan Penggabungan)	Form 81 SP-PZ-81
82	Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi	Form 82 SP-PZ-82
83	Izin Praktik Perawat	Form 83 SP-PZ-83
84	Izin Praktik Bidan	Form 84 SP-PZ-84
85	Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT)	Form 85 SP-PZ-85
86	Izin Laboratorium	Form 86 SP-PZ-86
87	Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D	Form 87 SP-PZ-87
88	Izin Fisioterapis	Form 88 SP-PZ-88
89	Izin Klinik	Form 89 SP-PZ-89
90	Surat Izin Apotik (SIA)	Form 90 SP-PZ-90
91	Surat Izin Perdagangan Eceran Obat	Form 91 SP-PZ-91
92	Izin Penyelenggaraan Optikal	Form 92 SP-PZ-92
93	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	Form 93 SP-PZ-93
94	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	Form 94 SP-PZ-94
95	Izin Sarana & Tenaga Kesehatan Lainnya Selain Tenaga Medis	Form 95 SP-PZ-95
96	Izin Kerja Refraksionis Optisien / Optometris (SIKRO/SIKO)	Form 96 SP-PZ-96
97	Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)	Form 97 SP-PZ-97
98	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	Form 98 SP-PZ-98
99	Surat Izin Praktek / Kerja Fisioterapis (SIPF/SIKF)	Form 99 SP-PZ-99
100	Izin Kerja / Praktek Tenaga Gizi (SIKTGz/SIPTGz)	Form 100 SP-PZ-100
101	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	Form 101 SP-PZ-101
102	Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT)	Form 102 SP-PZ-102
103	Izin Tukang Gigi	Form 103 SP-PZ-103
104	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Cair B3	Form 104 SP-PZ-104
105	Land Aplication	Form 105 SP-PZ-105
106	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	Form 106 SP-PZ-106
107	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	Form 107 SP-PZ-107

108	Izin Lingkungan	Form 108 SP-PZ-108
109	Upaya Kelola Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)	Form 109 SP-PZ-109
110	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)	Form 110 SP-PZ-110
111	Rekomendasi Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas	Form 111 SP-PZ-111
112	Izin Penggunaan Racun Api	Form 112 SP-PZ-112
113	Izin Usaha Pertanian	Form 113 SP-PZ-113
114	Izin Gangguan	Form 114 SP-PZ-114
115	Izin Instalasi Genset	Form 115 SP-PZ-115
116	Rekomendasi Wilayah Pertambangan (WIUP)	Form 116 SP-PZ-116
117	Rekomendasi izin usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi	Form 117 SP-PZ-117
118	Rekomendasi izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi	Form 118 SP-PZ-118
119	Rekomendasi Izin Pertambangan rakyat (IPR)	Form 119 SP-PZ-119
120	Rekomendasi Izin Pendirian SPBU	Form 120 SP-PZ-120
121	Rekomendasi Izin Depot BBM	Form 121 SP-PZ-121
122	Izin Energi Baru Terbarukan Bidang Panas Bumi	Form 122 SP-PZ-122
123	Izin Usaha Pemotongan Hewan	Form 123 SP-PZ-123
124	Izin Toko Obat Hewan	Form 124 SP-PZ-124
125	Izin Usaha Peternakan	Form 125 SP-PZ-125
126	Izin Praktek Dokter Hewan	Form 126 SP-PZ-126
127	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan	Form 127 SP-PZ-127
128	Izin Rumah Potong Hewan	Form 128 SP-PZ-128
129	Izin Reklame	Form 129 SP-PZ-129
130	Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Form 130 SP-PZ-130

BUFATI AGAM



INDRA CATRI